

TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL
BERBASIS MODAL SOSIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN SADDANG I KABUPATEN TANA TORAJA**

**SOCIAL FORESTRY DEVELOPMENT STRATEGY BASED
ON SOCIAL CAPITAL IN THE SADDANG I FOREST
MANAGEMENT UNIT TANA TORAJA REGENCY**



OLEH

KORNELIA PAIRUNAN

M012191022

PRODI MAGISTER ILMU KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL
BERBASIS MODAL SOSIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN SADDANG I KABUPATEN TANA TORAJA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Untuk Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

KORNELIA PAIRUNAN

Kepada

**PRODI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KORNELIA PAIRUNAN
NIM : M012191022
Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan mengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPLUAS RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAL TEMPEL', and 'E07FAKX062234838'.

KORNELIA PAIRUNAN

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS
MODAL SOSIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SADDANG I
KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

**KORNELIA PAIRUNAN
M012191022**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 27 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si
NIP. 196710051991031006

Prof. Dr. Ir. Samuel A. Paembonan, IPU
NIP. 195501151981021002

**Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,**

**Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin,**



Mukrimin S.Hut., MP., Ph.D.
NIP. 197802092008121001

Dr. Ir. A. Mujetahid, S.Hut., MP.
NIP. 196902081997021002

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan Judul "*Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Berbasis Modal Sosial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I Kabupaten Tana Toraja*" yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Tesis ini banyak pihak yang ikut berperan dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Muhammad Dassir, M.Si. dan Bapak Prof.Dr.Ir. Samuel A. Paembonan, IPU sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan tenaga, masukan dan pemikiran, serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi serta mengarahkan dalam penyelesaian Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr.Ir. Daud Malamassam, M.Agr, IPU, Prof. Dr. Yusran, S.Hut. MSi., IPU dan Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, MS. Sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Tesis ini.
3. Para Bapak Ibu dosen dan Pegawai Fakultas Kehutanan yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Para Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mulai dari Desa dan Kecamatan yang telah bersedia membantu Penulis dalam mendapatkan data dan informasi di lapangan untuk bahan penulisan Tesis ini.
5. Rekan-rekan kerja UPT KH Saddang I terutama penyuluh yang sudah membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data di lapangan.

6. Rekan – rekan seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Suami dan anak-anak tercinta dan seluruh keluarga yang tiada henti mendoakan dan mendukung penulis selama berjuang dalam pendidikan hingga penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dan kiranya Tesis ini dapat bermanfaat serta menjadi sumber informasi bagi yang membutuhkan.

Makassar, 26 Januari 2023

Kornelia Pairunan

ABSTRAK

Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia terbilang lambat. Hingga memasuki awal tahun 2023, luas kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan PS baru mencapai 5.318.627 Ha atau 41,8% dari target pemerintah. Salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan cukup luas adalah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 luas kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 108.968 Ha yang terbagi dalam 3 fungsi hutan yaitu hutan konservasi seluas 4.868 Ha, hutan lindung seluas 84.290 Ha dan hutan produksi seluas 19.810 Ha yang merupakan wilayah kerja KPH Saddang I. Dari total 159 desa, sebanyak 87desa atau 54% masuk dalam kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan modal sosial yang dimiliki dalam peningkatan pengelolaan perhutanan sosial dengan merisalah modal sosial yang dimiliki oleh pengelola PS, karakteristik individunya, dan hubungan antara karakteristik individu pengelola dengan modal sosial yang dimiliki. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang selanjutnya dianalisis dengan analisis SWOT dalam merumuskan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dalam pengelolaan Hutan di KPH Saddang I yaitu meliputi kepercayaan, norma sosial, kepedulian, tindakan proaktif, dan jaringan sosial, semuanya berada pada kategori tinggi. Karakteristik individu responden anggota KTH pengelola PS di wilayah KPH Saddang I yang termasuk dalam kategori tinggi adalah umur, lama tinggi, dan luas lahan, sementara kategori sedang adalah tingkat pendapatan, dan ketegori rendah adalah pendidikan formal dan non formal. Unsur-unsur karakteristik Individu yang berkorelasi kuat dengan unsur modal sosial, masing-masing adalah pendidikan formal dengan norma sosial, pendidikan non formal dengan kepercayaan dan jaringan, serta luas lahan juga dengan kepercayaan dan jaringan. Strategi pengembangan PS di KPH Saddang I dapat dilakukan melalui pengajuan permintaan bantuan alat transportasi kepada pemerintah daerah maupun pihak luar (LSM) sehingga dapat digunakan untuk usaha HHBK, pengembangan unit usaha anggota KTH dengan menghasilkan produk turunan HHBK, dan penyediaan akses modal oleh Pemdes maupun Pemda

Kata Kunci: Modal Sosial, Perhutanan Sosial, strategi

ABSTRACT

The development of Social Forestry (PS) in Indonesia is relatively slow. Until early 2023, the forest area that has obtained PS approval has only reached 5,318,627 hectares, or 41.8% of the government's target. One of the districts that have a fairly large forest area is Tana Toraja Regency. Based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 the area of forest area in Tana Toraja Regency reaches 108,968 Ha which is divided into 3 forest functions, namely 4,868 Ha of conservation forest, 4,868 Ha of protected forest, 84,290 Ha and 19,810 Ha of production forest which is the working area of KPH Saddang I. Out of a total of 159 villages, 87 villages, or 54% are included in the forest area. This study aims to formulate a community empowerment strategy based on social capital owned in improving social forestry management by examining the social capital owned by SF managers, their characteristics, and the relationship between the characteristics of individual managers and their social capital. Data collection was carried out by in-depth interviews which were then analyzed by SWOT analysis in formulating strategies. The results of the study show that social capital in forest management in KPH Saddang I, which includes trust, social norms, caring, proactive actions, and social networks, are all in the high category. The individual characteristics of the KTH members who manage PS in the KPH Saddang I area which are included in the high category are age, length of height, and land area, while the medium category is income level, and the low category is formal and non-formal education. strongly correlated with elements of social capital, respectively, formal education with social norms, non-formal education with trust and network, and the land area also with trust and network. PS development strategies in KPH Saddang I can be carried out through submitting requests for assistance with transportation equipment to local governments and outside parties (NGOs) so that they can be used for NTFPs businesses, developing KTH member business units by producing HHBK derivative products, and providing access to capital by Pemdes and Pemda

Keywords: Social Capital, Social Forestry, strategy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pemanfaatan Kawasan Hutan.....	5
2.2. Perhutanan Sosial.....	6
2.3. Hutan Kemasyarakatan.....	7
2.4. Hutan Hak	9
2.5. Hutan Desa	9
2.6. Modal Sosial.....	11
2.7. Tipologi Modal Sosial	14
2.8. Komponen Modal Sosial	16
2.9. Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan.....	25
2.10. Analisis SWOT	26
2.11. Definisi Operasional dan Parameter	29
2.12. Kerangka Pikir Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Waktu dan Tempat.....	33
3.2. Populasi dan Sampel	33
3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	33
3.4. Variabel Pengamatan.....	35

3.5. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Modal sosial yang terdapat dalam pengelolaan Hutan di KPH Saddang.....	42
4.2. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	47
4.3. Modal Sosial Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan.....	50
Perhutanan Sosial.....	50
4.4. Karakteristik Individu Kelompok Tani Hutan.....	58
4.5. Hubungan Karakteristik Individu dengan Bentuk – Bentuk Modal Sosial	64
4.6. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Modal Sosial Mengikat dan Modal Sosial Menjembatani	15
Tabel 2. Definisi Operasional Modal Sosial dan Karakteristik Sosial	29
Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian Peranan Modal Sosial	34
Tabel 4. Variabel, indikator dan parameter dari modal sosial (Y).....	35
Tabel 5. Variabel, indikator dan parameter dari karakteristik individu...	37
Tabel 6. Matriks identifikasi, pemberian bobot dan rating faktor internal	40
Tabel 7. Suhu dan Kelembaban Udara Rata-rata di Kabupaten Tana Toraja.....	48
Tabel 8. Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Mata.....	49
Tabel 9. Penduduk Tana Toraja berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 10. Kategori Tingkat Kepercayaan Responden dalam Pengelolaan	50
Tabel 11. Kategori Tingkat Ketaatan terhadap Norma Sosial oleh.....	52
Tabel 12. Kategori Tingkat Jaringan Petani Responden dalam Pengelolaan	54
Tabel 13. Tingkat Kepedulian Responden dalam Pengelolaan PS di .	56
Tabel 14. Kategori Tingkat Tindakan Proaktif Responden dalam	57
Tabel 15. Sebaran Responden Kelompok Tani Hutan berdasarkan Umur	59
Tabel 16. Sebaran Responden Kelompok Tani Hutan berdasarkan	60
Tabel 17. Sebaran Responden Pengelola PS berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 18. Sebaran Responden Pengelola PS berdasarkan Tingkat	62
Tabel 19. Sebaran Responden Pengelola PS berdasarkan Lama Tinggal	63
Tabel 20. Sebaran Responden Pengelola PS berdasarkan Luas Lahan	64
Tabel 21. Hubungan antara Karakteristik Individu dengan Modal Sosial	64
Tabel 22. Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan PS di KPH Saddang I.....	65
Tabel 23. Matriks IFAS dalam Pengelolaan PS di KPH Saddang I.....	66

Tabel 24. Matriks EFAS dalam Pengelolaan PS di Wilayah KPH Saddang.....	68
Tabel 25. Matriks SWOT Strategi Pengelolaan PS di Wilayah Kerja KPH.....	69
Tabel 26. Analisis Matrix Space Pengelolaan Hutan di KPH Saddang I.	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Kerangka Pikir Penelitian	32
Gambar 2. Matrix SWOT	41
Gambar 3. Grand Strategy Selection Matrix Pengelolaan PS.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia terbilang lambat. Hingga memasuki awal tahun 2023, luas kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan PS baru mencapai 5.318.627 Ha atau 41,8% dari target pemerintah (GoKUPS. 2023). Di Sulawesi Selatan luas persetujuan PS telah mencapai 182.277,01 Ha dengan jumlah izin yang terbit sebanyak 478 atau jika dirata-ratakan persetujuan yang terbit setiap tahunnya sebanyak 59 persetujuan (Anugrah. 2023). Angka ini menunjukkan bahwa perkembangan PS di Sulawesi selatan cukup lambat apabila dibandingkan dengan indikator PIAPS seluas 272.858,94 Ha (PIAPS Revisi VII).

Salah satu kabupaten yang memiliki hutan cukup luas adalah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 luas kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 108.968 Ha yang terbagi dalam 3 fungsi hutan yaitu hutan konservasi seluas 4.868 Ha, hutan lindung seluas 84.290 Ha dan hutan produksi seluas 19.810 Ha. Selain itu, dari total 159 desa, sebanyak 87 desa atau 54% masuk dalam kawasan hutan.. Namun, hingga saat ini jumlah persetujuan yang terbit untuk wilayah Tana Toraja sampai dengan tahun 2020 baru 5 persetujuan Perhutanan Sosial. Hal ini menjelaskan lambatnya perkembangan program PS di Tana Toraja jika dibandingkan dengan wilayah lahan garapan masyarakat yang telah dikelola selama ini yang berada didalam kawasan hutan yaitu sebanyak 87 desa.

Struktur pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan di tana toraja adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang 1 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Keterbatasan sumber daya manusia di KPH menjadi

alasan utama rendahnya persetujuan PS yang telah terbit. Ini belum termasuk sikap masyarakat terhadap PS sebagai pengguna manfaat langsung.

Menurut Firdaus (2018), keberhasilan pembangunan kehutanan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan serta kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya. Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya bagaimana masyarakat itu dapat mengenal dan merefleksikan permasalahannya sendiri, potensi diri dan lingkungannya serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional dengan cara atau metode partisipatif. Seharusnya, ketergantungan yang tinggi atas hutan sebagai sumber penghidupan akan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mempertahankan kelestarian hutan dimana pengelolaan hutan seringkali berhubungan dengan nilai, kepercayaan satu sama lain, norma dan aturan sosial budaya atau biasa disebut dengan modal sosial yang berlaku didalam masyarakat. Karakteristik modal sosial ini merupakan identitas dari suatu kelompok masyarakat yang sulit dipisahkan dan sangat berpotensi dalam mengembangkan suatu program yang direncanakan secara bersama-sama (BPSKL, 2018).

Hubungan kekerabatan dalam anggota kelompok atau masyarakat dapat mendukung aspek saling percaya untuk membangun kerjasama berdasarkan nilai-nilai solidaritas dan saling menguntungkan satu dengan lainnya. Saling percaya, jaringan sosial kolektif, dan pranata yang mengandung nilai, norma, sanksi dan aturan merupakan elemen pokok modal sosial yang berfungsi sebagai keberlangsungan kehidupan sosial (Pretty & Ward, 1999 dalam Santoso, 2007). Sebagaimana dalam penelitian (F. Asmin. 2017) bahwa modal sosial yang mengalir dalam bentuk kerja kolektif dalam pengelolaan hutan di Koto Malintang dan Simancuan provinsi Sumatera Barat memberikan keuntungan bersama. Modal sosial adalah pemicu tata kelola lahan tingkat lokal dimana struktur jaringan akan membentuk arus informasi, hubungan kekuasaan dan

kepercayaan diantara pelaku pengelolaan hutan (Elena *et al*, 2016). Modal sosial merupakan prasyarat utama melakukan tindakan bersama dalam mengelola sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Masyarakat yang masih memelihara elemen modal sosial di tepian hutan, baik tipe adat atau rakyat maupun negara cenderung lebih konsisten untuk memelihara sumberdaya hutan daripada masyarakat yang telah mengalami pemudaran nilai dan norma modal sosial (Santoso, 2007).

Menurut Burt (1992), Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan hubungan satu sama lain dan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan juga aspek eksistensi sosial yang lain. Karakteristik modal sosial menjadi salah satu indikator yang akan menentukan keberlangsungan pengelolaan Perhutanan Sosial. Rendahnya salah satu kategori modal sosial akan mengakibatkan menurunnya dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam program Perhutanan Sosial. Masyarakat Tana Toraja yang bermukim didalam dan sekitar kawasan hutan memiliki modal social yang cukup tinggi sebagai modal dalam pengelolaan hutannya. Secara turun temurun mereka memiliki budaya gotong royong dalam setiap kegiatan social kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka untuk menjamin keberhasilan program Perhutanan Sosial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I Kabupaten Tana Toraja perlu dilakukan penelitian terkait modal sosial dan karakteristik individu pada masyarakat lokal sehingga kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menerima, melaksanakan dan mengelola program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan masalah yang yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi dan potensi modal sosial yang dimiliki oleh KTH pengelola hutan dengan skema perhutanan sosial?

2. Bagaimana karakteristik individu anggota KTH yang mengelola Perhutanan Sosial?
3. Bagaimana hubungan Karakteristik individu dengan modal sosial yang dimiliki
4. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial yang dimiliki dan karakteristik anggota KTH dalam rangka percepatan pembangunan perhutanan sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merisalah modal sosial yang dimiliki oleh KTH pengelola hutan dengan skema perhutanan sosial
2. Mengidentifikasi karakteristik individu anggota KTH yang mengelola Perhutanan Sosial
3. Menganalisis hubungan Karakteristik individu dengan modal sosial yang dimiliki
4. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan modal sosial yang dimiliki dalam peningkatan pengelolaan perhutanan sosial

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, beserta para pemangku kepentingan PS lainnya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan percepatan program pengembangan Perhutanan Sosial, khususnya di Kabupaten Tana Toraja.
2. Bahan referensi ataupun rujukan bagi peneliti dalam penelitian yang terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial berbasis modal sosial dan karakteristik anggota KTH terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada Kawasan Hutan Produksi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 ayat 1 memuat bahwa hutan pada dasarnya mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Seluruh kawasan hutan dapat dimanfaatkan kecuali hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sementara pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan bahwa pemanfaatan hutan atau sumberdaya hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Anonim, 2002). Menurut Ismawan dalam Tim Bina Swadaya (2001), manfaat keberadaan hutan bagi kehidupan akan dirasakan oleh masyarakat terutama yang hidup di sekitar hutan, justru setelah terjadi perubahan hutan yang cukup drastis akibat adanya pengrusakan hutan oleh sekelompok oknum. Berbagai dampak negatif mulai banyak dirasakan masyarakat dengan ketiadaannya hutan.

Banyaknya tindak kriminalitas terhadap hutan bukan berarti harus memotong akses hutan terhadap masyarakat, karena gangguan tersebut belum tentu datang dari masyarakat di sekitar hutan. Pola pikir yang perlu dibangun sekarang ini adalah bahwa kelestarian hutan akan terjaga jika masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap hutan yang diaktualisasikan dengan penjagaan terhadap sumberdaya yang ada untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Rasa

memiliki akan tumbuh apabila masyarakat diberikan akses dalam mengelola hutan secara baik. Hal yang wajar apabila selama ini masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan memandang hutan sebagai sumber ekonomi keluarga, sumber pengadaan bahan pangan, sumber bahan obat-obatan, memelihara lingkungan yang sejuk, melestarikan sumber mata air dan sebagai tempat ritual kebudayaan masyarakat setempat (Awang S. A, 2003).

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan salah satu terobosan dalam pembangunan di sektor kehutanan dan menjadi alternatif pendapatan masyarakat sekitar hutan (Nugroho A., 2015). Sektor kehutanan dapat berperan dalam ketahanan pangan melalui pengembangan jenis-jenis pangan disekitar dan dalam kawasan hutan serta secara tidak langsung dalam pemberian ijin legal kawasan sebagai sumber pakan ternak (Butar, 2009).

2.2. Perhutanan Sosial

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan.

Perhutanan sosial ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak di beberapa negara. Negara Indonesia menggunakan berbagai istilah seperti hutan kemasyarakatan, hutan kerakyatan dan kehutanan masyarakat. Perhutanan sosial dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat (CIFOR, 2012). Perhutanan sosial mencakup semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran, hak dan akses masyarakat serta ada upaya memperhatikan perpaduan antara

kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian sumberdaya hutan. Masyarakat memiliki akses kelola seluas 2 ha/KK di pulau Jawa dan 4-5 ha/KK diluar pulau jawa melalui program ini (Supriyanto, 2018 dalam BPSKL, 2018).

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan satu proses untuk memperkuat kapasitas masyarakat setempat sehingga mampu merespon perubahan-perubahan lingkungannya dan mampu secara terus-menerus melakukan pembaruan (inovasi) sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat disamakan dengan proyek-proyek kehutanan yang hanya bersifat fisik dan temporer (RHL atau Program penanaman serentak). Suatu proses pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi dan pendekatan spesifik dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kegiatan pemberdayaan juga membutuhkan investasi sumberdaya finansial yang memadai untuk dapat melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat, penguatan kapasitas dan pendampingan intensif sehingga masyarakat mampu mengelola program secara berkelanjutan dengan baik (Kemitraan, 2011).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Lingkungan. (Kementerian LHK, 2016)

2.3. Hutan Kemasyarakatan

Salah satu program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat disekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Peraturan Menteri Kehutanan (2014) menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kawasan yang dapat dialokasikan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat dapat memperoleh hak

pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa HKm mampu mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera yang tinggal di pedesaan (Respatiadi, 2016).

Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan dengan maksud mengembangkan kapasitas dan memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta menyelesaikan persoalan sosial. HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Santoso, 2007). Hayati (2015) dalam penelitiannya menemukan percepatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dituntut untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi dengan mengembangkan program HKm dengan pola agroforestry.

HKm memberikan keamanan dan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai sumber pendapatan bagi petani yang sangat tergantung dengan kawasan hutan sedangkan bagi pemerintah dianggap sebagai salah satu modal pemberdayaan yang memberikan peluang masyarakat untuk memperoleh manfaat dengan tetap menjaga fungsi hutan (Sanudin, 2016). Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema HKm merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik kawasan hutan. HKm merupakan salah satu alternatif dan jalan tengah untuk penyelesaian konflik tenurial (Pradityo, 2016). Skema HKm dapat dijadikan jalan keluar dari konflik tenurial yang terjadi jika berjalan memenuhi syarat-syarat seperti kejelasan batas wilayah yang terdefinisi, kejelasan status sosial masyarakat, ketergantungan terhadap sumberdaya alam, legalisasi dari sistem pengelolaan, pengelolaan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, koordinasi, sinkronisasi serta keterpaduan pengelolaan antar stakeholder (Abdurrahim, 2015).

Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui skema HKm di Lampung Barat oleh

Sanjaya (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat mulai dari aspek perencanaan, aspek organisasi dan aspek pelaksanaannya secara keseluruhan dinilai dalam kategori baik. Penelitian oleh Elisabeth (2017) juga menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan terbukti ada proses pemberdayaan masyarakat yang dinilai baik mulai dari pelaksanaan reboisasi, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.

2.4. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pengaturan hutan hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari. Pengaturan ini bertujuan agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu (KLHK, 2019).

Hutan adat merupakan salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat hutan adat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam disekitarnya sesuai kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung turun-temurun.

2.5. Hutan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa pada Ketentuan Umum pasal 1 (7) disebutkan bahwa Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Lebih lanjut disebutkan Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak. Penyelenggaraan Hutan Desa dimaksudkan untuk memberi akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Hutan Desa dapat

dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan serta berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan (Peraturan Menteri Kehutanan, 2008).

Upaya pemberdayaan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan pada hutan desa dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Pengelolaan hutan bukan hanya memanfaatkan sumberdaya hutan tetapi juga bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (BPDAS, 2010).

Awang (2003) membagi pengertian hutan desa dari beberapa berbagai aspek yaitu : (a). Aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat (b). Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa (c). Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Peraturan Menteri Kehutanan (2008) menyebutkan bahwa jangka waktu masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan dalam skema Hutan Desa adalah 35 tahun. Hak pengelolaan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Pada prinsipnya hak pengelolaan desa dilarang untuk kepentingan lain diluar rencana

pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk pengembangan kawasan hutan memang masih menjadi masalah di Indonesia. Penelitian terkait pengelolaan dan pemanfaatan melalui skema Hutan Desa yang dilakukan Suwanti, dkk (2015) menunjukkan bahwa rencana pengelolaan yang belum ada seperti rencana kegiatan teknis kehutanan (penanaman, penjarangan dan pemanenan), peran pemerintah dalam melakukan aktivitas penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan kelembagaan petani sebagai wadah menjadi penghambat pengelolaan hutan.

2.6. Modal Sosial

Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut (Syahra, 2003). Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre' (Hanifan, 1916) dalam Fathy (2019). Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Modal sosial adalah merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spectrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota

masyarakat (bangsa) secara bersama-sama. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural, seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2001). Modal sosial dibutuhkan guna menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bias diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas masyarakat dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan hati (*dependability*). Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial umum, dimana merupakan tempat meleburnya kepercayaan dan faktor yang penting bagi kesehatan ekonomi sebuah negara, yang bersandar pada akar-akar kultural (Fukuyama,2001). Modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat (atau bangsa) guna mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi untuk mencapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat atau bangsa tersebut. Secara umum modal sosial adalah merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (*trust*). Atau dapat dikatakan bahwa *trust* dapat dipandang sebagai syarat keharusan (*necessary condition*) dari terbentuk dan terbangunnya modal sosial yang kuat (atau lemah) dari suatu masyarakat. Pada masyarakat memiliki kapabilitas *trust* yang tinggi (*high trust*), atau memiliki *spectrum of trust* yang lebar (panjang), maka akan memiliki potensi modal sosial yang kuat. Sebaliknya pada masyarakat yang memiliki kapabilitas *trust* yang rendah (*low trust*), atau memiliki *spectrum of trust* yang sempit (pendek), akan memiliki potensi modal sosial yang lemah

Modal sosial merupakan salah satu sumber daya sosial yang dapat dijadikan investasi untuk mendapatkan sumber daya baru lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan modal sosial dapat dikaitkan

dengan komunitas, masyarakat sipil, maupun identitas-identitas lain yang kokoh. Para ahli memberikan pengertian tentang modal sosial sangat bervariasi, sesuai dengan sudut pandang serta dimensi yang dijadikan sebagai rujukan untuk memaknai modal sosial. Berbeda dengan modal manusia, yang lebih merujuk ke dimensi individu terkait dengan daya serta keahlian yang dimiliki seorang individu. Pada modal manusia lebih menekankan pada potensi individu maupun kelompok dan hubungan antar kelompok dalam suatu jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Keberadaan modal sosial didalam masyarakat harus didayagunakan dan dioptimalkan karena didalam masyarakat pasti memiliki modal sosial namun sudah lama tidak difungsikan yang disebabkan oleh adanya sistem sentralisasi pada Orde Baru yang mana peraturan harus berdasarkan dari pusat (Supratiwi 2013).

Konsep modal sosial muncul sebagai respons dari kondisi semakin meregangnya hubungan antar manusia dan semakin munculnya ketidakpedulian terhadap sesama manusia (Sasongko 2012). Seseorang akan berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lainnya dalam jaringan tersebut, sejauh jaringan tersebut menjadi sumberdaya maka hal tersebut dapat dipandang sebagai modal sosial.

Modal sosial merupakan salah satu sumberdaya sosial yang dapat dijadikan investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru lain didalam masyarakat karena modal sosial dapat dikaitkan dengan komunitas, masyarakat sipil, maupun identitas-identitas lainnya yang kokoh (Mustofa, 2013). Fukuyama (2007) dalam Adelina (2014) mendefinisikan modal sosial sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam masyarakat. Modal sosial dibagi kedalam beberapa bagian seperti jaringan sosial, kepercayaan, norma-norma dari timbal balik, fokus kepada keluaran sosial (Putnam dalam Hauberer, 2011), dan pranata (Nopianti dan Elvina, 2011). Pada dimensi hubungan saling percaya dapat dilihat dari adanya kejujuran, kewajaran, egaliter, toleransi, dan kemurahan hati.

Modal sosial memiliki cakupan dimensi yang sangat luas dan kompleks (Yuliarmi, 2011 dalam Syahriar, 2015).

2.7. Tipologi Modal Sosial

Menurut Hasbullah (2006) dalam Indhasari (2012), tipe dasar modal sosial yaitu modal sosial yang menjembatani (*Bridging Social Capital*) dan modal sosial yang mengikat (*Bounding Social Capital*). Kedua modal sosial tersebut memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

2.7.1. Modal Sosial Mengikat (*Bounding Social Capital*)

Modal sosial mengikat cenderung bersifat eksklusif. Karakteristik dasar yang sekaligus menjadi ciri khas dalam konteks ide, relasi dan perhatian adalah lebih berorientasi kedalam (*Inward Looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*Outward Looking*). Hasbullah (2006) menyatakan bahwa pada masyarakat yang *bonded* atau *inward looking*, meskipun hubungan sosial yang tercipta tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi hubungan tersebut kurang merefleksikan kemampuan masyarakat untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh hanya sekedar dalam batas kelompok saja pada keadaan tertentu dengan struktur hirarki feodal dan kohesifitas yang mengikat.

Kelompok-kelompok masyarakat tradisional yang *socially inward looking* kadang terdapat modal sosial namun kekuatannya terbatas pada satu dimensi saja, yaitu dimensi kohesifitas kelompok yang terbentuk akibat faktor keeratan hubungan emosional kedalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga berpola tradisional.

2.7.2. Modal sosial yang menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, *group*, asosiasi atau masyarakat. Modal sosial menjembatani akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan jaringan yang kuat,

menggerakkan identitas yang lebih luas dan *reciprocity* yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal.

Bentuk modal sosial ini pada umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian dibanyak negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial ini memungkinkan banyak perkembangan didimensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkat dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Adapun perbedaan antara modal sosial mengikat (*Bounding Social Capital*) dan modal sosial menjembatani (*Bridging Social Capital*) terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Modal Sosial Mengikat dan Modal Sosial Menjembatani

Tipologi Modal Sosial		
No.	Modal Sosial Mengikat (<i>Bounding Social Capital</i>)	Modal Sosial Menjembatani (<i>Bridging Social Capital</i>)
1.	Terikat	Terbuka
2.	Perbedaan yang kuat antara "orang kami" dan "orang luar"	Memiliki jaringan yang lebih fleksibel
3.	Hanya ada satu alternatif jawaban	Toleran
4.	Sulit menerima arus perubahan	Memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah
5.	Kurang akomodatif terhadap pihak luar	Akomodatif untuk menerima perubahan
6.	Mengutamakan kepentingan kelompok	Cenderung memiliki sikap yang <i>altruistic</i> , <i>humanitaristik</i> dan <i>universal</i>
7.	Mengutamakan solidaritas kelompok	

Sumber : Hasbullah (2006) dalam Indhasari (2012).

2.8. Komponen Modal Sosial

Faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal adalah: kebiasaan, kedudukan (peranan aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal. Modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Bhandari dan Yasinoubu, 2009 dalam Fathy, 2019). Lebih lanjut disebutkan bahwa Ketiga hal tersebut, yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan merupakan indikator atau unsur modal sosial. Ketiganya merupakan hubungan saling berkelindan

Modal sosial merupakan salah satu dari lima komponen modal yang dimiliki bersama maupun dalam tatanan individu yaitu modal fisik, modal manusia, modal alam dan modal finansial. Beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai komponen-komponen dari modal sosial ini. Hasbullah (2006) membagi komponen modal sosial yang terdiri dari norma sosial, kepercayaan, partisipasi dalam jaringan, hubungan timbal balik serta tindakan yang proaktif.

2.8.1. Norma Sosial (Social Norms).

Norma sosial adalah komponen yang berisi peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu hubungan relasional tertentu, baik itu dimasyarakat maupun kelembagaan tertentu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Semakin patuh anggota-anggota suatu komunitas tertentu, maka semakin baik modal sosialnya.

Modal sosial dibentuk dari norma-norma informal berupa aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mendukung terjadinya kerjasama diantara dua atau lebih individu. Norma-norma tersebut dapat bervariasi dari hubungan timbal balik antara dua orang sampai pada hubungan kompleks, dan kemudian terkolaborasi baik melalui aturan-aturan tertulis ataupun kerjasama berdasarkan nilai-nilai tradisional untuk berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain. Nilai-nilai yang dimaksud misalnya

kejujuran, sikap dalam komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya.

Menurut Narwoko dan Bagong (2004) dalam Indhasari (2012) bahwa klasifikasi yang membedakan norma-norma sosial antara lain :

2.8.1.1. Norma Resiprositas

Resiprositas berbicara tentang pertukaran timbal balik antar individu atau kelompok yang selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat. Tanpa adanya hubungan simetris antar kelompok atau antar individu, maka resiprositas cenderung tidak akan berlangsung. Hubungan ini adalah hubungan sosial dimana masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung. Karakteristik lain yang menjadi syarat sekelompok individu atau beberapa kelompok dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan personal diantara mereka. Pola hubungan ini terutama terjadi didalam komunitas kecil, dimana anggota-anggotanya menempati lapangan hidup yang sama. Dalam komunitas kecil itu, kontrol sosial sangat kuat dan hubungan sosial yang intensif mendorong orang untuk berbuat mematuhi adat kebiasaan.

2.8.1.2. Norma Kebiasaan (*Folkways*)

Folkways berarti tata cara yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan. *Folkways* dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan didalam hidup mereka sehari-hari karena dipandang sebagai suatu hal yang lazim.

Sanksi-sanksi pada norma kebiasaan relatif tidak berat dan sifatnya tidak formal terencana dan teratur, melainkan bersifat informal, seperti berupa sindiran, pengunjingan atau olok-olok. Apabila satu orang tertentu sampai berani melanggar berbagai macam norma kebiasaan secara terus-menerus, orang pasti akan tersisih dari kontak-kontak sosial apabila menyimpang dan melanggar ketentuan-ketentuan.

2.8.1.3. Norma Tata Kelakuan (*Mores*)

Mores adalah segala norma yang secara moral dipandang benar. Pelanggaran terhadap *mores* selalu dikutuk sebagai sesuatu hal yang secara moral tidak dapat dibenarkan, misalnya : keharusan berlaku jujur, keharusan bersikap kesatria dan keharusan bekerja rajin.

2.8.1.4. Norma Hukum

Hukum diperlukan untuk menegakkan keadaan tertib sosial dan mendapatkan organisasi politik secara formal dan berprosedur bertugas memaksakan penataan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Hukum yang dijadikan dari *mores* dengan ditunjang oleh wibawa suatu struktur kekuasaan politik inipun merupakan hukum yang tak tertulis (hukum adat). Hukum tertulis jauh lebih berpikir dan lebih terlafalkan secara tegas. Hukum tertulis benar-benar merupakan hasil suatu perencanaan dan pikiran-pikiran yang sadar.

Norma adalah suatu elemen penting karena sebuah asosiasi sosial (organisasi sosial) didalamnya mengandung norma-norma berupa aturan-aturan informal dan nilai-nilai yang memfasilitasi adanya koordinasi diantara anggota dalam sebuah sistem sosial. Hal ini menurutnya memungkinkan adanya tindakan-tindakan kerjasama untuk memudahkan kerjasama dalam pekerjaan guna mencapai keuntungan kolektif yang dirasakan bersama. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari modal sosial yang diungkapkan, yaitu:

- a. Adanya kewajiban dan harapan. Ini dimaksudkan bahwa dalam modal sosial yang dibangun dari kepercayaan, jaringan dan norma sosial masing-masing individu mempunyai kewajiban dan harapan dalam melakukan tindakan sosialnya.
- b. Adanya informasi potensial yang terjalin melalui hubungan sosial yang sifatnya informal dan dapat menyimpan serta menyampaikan informasi.
- c. Norma-norma dan sanksi yang efektif.
- d. Hubungan kekuasaan.

- e. Kesamaan organisasi sosial. Organisasi sosial terbentuk dari tujuan yang spesifik dimana terjadi proses pencapaian tujuan dan didalamnya terdapat mekanisme organisasi yang cukup luas skalanya dalam usaha pencapaian tujuannya.
- f. Kesengajaan dalam membentuk organisasi.

Menurut Field (2003) dalam Indhasari (2012), ciri-ciri yang terkandung dalam norma sosial antara lain :

- a. Norma sosial tidak tertulis atau lisan
- b. Hasil kesepakatan dari seluruh anggota dalam masyarakat pada wilayah tertentu.
- c. Bersifat mengikat
- d. Terdapat sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Norma-norma yang membentuk modal sosial dapat bervariasi dari hubungan timbal balik antara dua individu sampai pada hubungan kompleks. Selain dibentuk oleh aturan tertulis, misalnya dalam organisasi sosial, dalam menjalin kerjasama pada sebuah interaksi sosial juga terkait dengan nilai-nilai tradisional. Nilai yang dimaksud, misalnya kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban dan ikatan timbal balik. Nilai-nilai sosial merupakan aturan tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain (Field, 2003 dalam Indhasari, 2012).

2.8.2. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan komponen mengenai bagaimana seseorang percaya kepada orang lain dalam suatu komunitas ataupun diluar komunitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana harapan-harapan yang muncul dari kedua belah pihak dapat terpenuhi bersifat timbal balik. *Trust* atau kepercayaan bagi sebagian analisis sosial disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari modal sosial dalam pembangunan yang menjadi unsur dari modal sosial (Dharmawan, 2002). Kepercayaan terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu :

- a. Kepercayaan pada aras individu dimana kepercayaan tersebut merupakan bagian dari moralitas dan adab yang selalu melekat pada karakter setiap individu. Kepercayaan pada aras ini terbentuk bila seseorang dapat memenuhi harapan orang lain sesuai janji (*promise keeping*) yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan adanya nilai mengemban amanah.
- b. Kepercayaan pada aras kelompok dan kelembagaan yang menjadi karakter modal kelompok dan institusi. Kepercayaan pada aras ini termasuk regulasi dan beragam bentuk *agreed institutional agreement* yang digunakan dalam rangka menjaga amanah ditingkat grup sosial secara efektif.
- c. Kepercayaan pada sistem yang abstrak seperti ideologi dan religi yang membantu setiap individu dalam mengoperasionalkan kepercayaan dalam hubungan bermasyarakat.

Fukuyama (2001) berpendapat, unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Kepercayaan harus dimiliki oleh masing-masing pribadi sehingga dapat bekerjasama secara lebih efektif. Fukuyama menambahkan kepercayaan adalah pengharapan dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama demi kepentingan anggota lain dari komunitas itu. Ada tiga perilaku dalam komunitas yang mendukung kepercayaan yaitu perilaku normal, jujur dan kooperatif.

Sekarang ini, faktor modal sosial memiliki peran penting seperti modal fisik, hanya masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi akan mampu menciptakan organisasi-organisasi berskala besar dan bisa bersaing dalam ekonomi global. Solidaritas adalah salah satu faktor perekat dalam gerakan modal sosial karena rasa solidaritas masyarakat bisa menyatukan persepsinya tentang hal yang ingin mereka perjuangkan. Jenis solidaritas yang umum didapati dalam modal sosial dewasa ini adalah solidaritas organis, karena karakteristik masyarakat sekarang ini cenderung sudah kompleks.

Putnam (1993) dalam Suharto (2007), mengemukakan bahwa kepercayaan menjadi salah satu unsur dan sumber kekuatan modal sosial karena kepercayaan merupakan produk modal sosial yang baik dan berperan penting sebagai energi pembangunan masyarakat. Kepercayaan memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas dan merupakan bagian penting dari institusi sosial. Berbagai tindakan yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi dalam beragambentuk dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama.

2.8.3. Jaringan Sosial (*Social Networks*)

Jaringan sosial adalah komponen sosial mengenai banyaknya relasi-relasi yang terbentuk dari suatu komunitas didalamnya maupun antar komunitas. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak seseorang yang dikenal baik kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan. Jaringan sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu melainkan akan terletak pada kecenderungannya yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi dan jaringannya. Banyaknya jejaring memudahkan seseorang seseorang untuk meminta bantuan ketika dalam kesusahan karena semakin banyak jejaring maka semakin banyak opsi yang muncul untuk diminta bantuannya.

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud pada jaringan-jaringan kerjasama antar manusia sehingga memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh (Suharto, 2007). Jaringan sosial dilihat dengan menggunakan beberapa ukuran, yaitu :

Ikatan informal yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang lebih familiar dan bersifat personal seperti pada ikatan keluarga, pertemanan atau bertetangga.

- a. Ikatan yang sifatnya lebih umum. Ikatan ini seperti ikatan pada masyarakat setempat, masyarakat umum, masyarakat dalam kesatuan kewarganegaraan. Ikatan ini dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang sifatnya umum.
- b. Ikatan kelembagaan yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dalam kelembagaan yang ada. Misalnya, pada ikatan dalam sistem kelembagaan dan hubungan keluasan (Stone dan Hughes, 2002 dalam Adelina, 2014).

Ukuran lain yang berkaitan dengan jaringan sosial dalam modal sosial adalah karakteristik jaringan sosial yang terdiri dari tiga karakteristik yaitu : bentuk dan luas (*size and extensiveness*), kerapatan dan ketertutupan (*density and closure*) dan keragaman (*diversity*). Karakteristik bentuk dan luas, misalnya mengenai jumlah hubungan informal yang terdapat dalam sebuah interaksi sosial, jumlah tetangga mengetahui hubungan pribadi seseorang dalam sebuah sistem sosial dan jumlah kontak kerja. Kerapatan dan ketertutupan sebuah jaringan sosial dapat dilihat dengan seberapa besar sesama anggota keluarga saling mengetahui teman-teman dekatnya, diantara teman saling mengetahui satu sama lainnya, masyarakat setempat saling mengetahui satu sama lainnya.

Keragaman dapat dilihat dari jaringan sosial yang dikarakteristikan seperti dari keragaman etnik teman, perbedaan pendidikan dalam sebuah grup atau dari pencampuran budaya dalam wilayah setempat (Suharto, 2007).

2.8.4. Hubungan timbal balik (*Reciprocity*) serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Dalam memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya karena dalam setiap orang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain sebagai implikasi dari manusia adalah makhluk sosial. Sistem pertukaran dalam kehidupan

sering terjadi, hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik terhadap barang maupun jasa.

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan orang lain). Seseorang atau banyak orang lain dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa batas waktu tertentu.

Menurut Hayypa dan Maki (2003) dalam Widodo (2015), partisipasi dalam asosiasi sukarela merupakan faktor kunci dari modal sosial karena didalam partisipasi sosial akan terjadi interaksi antar anggota kelompok. Interaksi-interaksi yang terjadi seperti pertukaran ide, informasi, pengetahuan, gagasan serta merumuskan cara dengan maksud mencari solusi dari masalah yang dihadapi sehingga menghasilkan sebuah inovasi atau keunggulan kompetitif. Inovasi dalam hal ini adalah inovasi proses yang berarti metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah (misalnya distribusi atau produksi) yang lebih baik atau lebih murah. Interaksi sosial pada prinsipnya akan terjadi pertukaran ide, informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya memunculkan hubungan timbal balik yang akan meningkatkan produktivitas.

Masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dimana memiliki bobot resiprositas akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Ini akan terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Hasbullah (2006) menyatakan modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bahan penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada didalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi dan membangun jaringannya. Salah

satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu organisasi atau perkumpulan untuk melibatkan diri dalam suatu hubungan timbal balik.

Jenis-jenis resiprositas menurut Sahlins (2002) dalam Pribadhi (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Resiprositas umum (*generalized reciprocity*) dimana individu atau kelompok yang memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tidak menentukan batas waktu pengembalian. Tidak ada hukum yang ketat untuk mengontrol seseorang *member* atau mengembalikan hanya berlandaskan moral yang mendorong seseorang tersebut menerima resiprositas sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar.
- b. Resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*) dimana hubungan yang terjadi menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding disertai kapan memberikan, kapan menerima dan kapan mengembalikan. Pertukaran yang dilakukan masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari patnernya namun tidak menghendaki untuk memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima.
- c. Resiprositas negatif dimana prinsip kekeluargaan dan kesetiakawanan merupakan bukti bahwa resiprositas lebih manusiawi daripada pertukaran pasar. Resiprositas seperti ini sering dipakai oleh seseorang yang mempunyai kepentingan khusus dalam memobilisasi sumberdaya dalam masyarakat.

2.8.5. Tindakan yang proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi mencari senantiasa jalan bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat (Hasbullah, 2006). Anderson et al, 2002 dalam Lawang, 2005 menyatakan bahwa keberadaan modal sosial baik yang bersifat proses, pelumas maupun perekat tidak akan terjadi tanpa ada tindakan dari masyarakat. Lenggono (2004) menyebutkan bahwa proaktif sebagai bagian dari modal

sosial merupakan kerelaan warga sebagai subyek dalam suatu pembangunan.

2.9. Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan

Modal sosial dalam pengelolaan hutan pernah diteliti oleh Evi et. Al. (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berupa jaringan sosial, kepercayaan, kerjasama, komunikasi dan informasi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Margasari dan Desa Muara Gading Mas tergolong rendah. Modal sosial yang lemah ini meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran dan kriminalitas serta menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

M. Rijal (2013) tentang peran modal sosial dalam pelestarian hutan menemukan bahwa bentuk modal sosial yang dipegang teguh oleh elemen yang ada di masyarakat adat Kenegerian Rumbio terbukti dapat bekerja secara efektif dalam mengatur perilaku. Masyarakat membentuk persukuan dan adat istiadat untuk memupuk hubungan kekeluargaan, persatuan, saling menghormati dan saling mengenal satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menyusun kehidupan masyarakat yang baik. Adat istiadat merupakan instrument untuk pengkomunikasian nilai-nilai dan norma-norma yang telah terbentuk dalam masyarakat. Sanksi-sanksi yang bersifat adil diterapkan secara adil tanpa terkecuali sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan keluarganya. Nilai-nilai adat, norma, partisipasi dan rasa percaya akan menyebabkan timbulnya tindakan proaktif masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjaga hutan larangan secara Bersama. Nilai-nilai adat ini dijadikan sebagai pola pengelolaan yang diakui secara hukum untuk mengelola lingkungannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kebiasaan setempat.

Nengsih (2016) tentang peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri mempunyai modal sosial yang tinggi berupa peranan, aturan dan kepercayaan yang ada di masyarakat Kelurahan

Selopuro telah berperan penting dalam mengelola hutan rakyat yang baik. Peranan tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan peranan, aturan dan kepercayaan yang datang dari norma, nilai, sikap dan kepercayaan yang memperkuat dan mendorong meningkatnya harapan manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas pemilik/pengelola hutan rakyat.

2.10. Analisis SWOT

Beraneka ragam faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis sesuatu yang bersifat strategis, sehingga terpilihnya suatu alternatif tertentu yang diyakini merupakan keputusan yang paling tepat. Para pakar sependapat bahwa instrument untuk menilai berbagai faktor yang layak diperhitungkan yakni analisis SWOT dan pendekatan matriks.

Menurut *Rangkuti* (2017) SWOT adalah singkatan *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) yang adalah lingkungan internal serta *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang adalah lingkungan eksternal. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat dimaksimalkan *Strengths* dan *Opportunities*, namun secara bersamaan dapat meminimalkan *Weaknesses* dan *Threats*. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis dan kebijakan pribadi. Dengan demikian suatu perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis suatu usaha (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Analisis ini terbagi atas 4 (empat) komponen dasar yaitu :

- 1) *Strength* (S), adalah karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
- 2) *Weakness* (W), adalah karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja unit
- 3) *Opportunity* (O), adalah karakter dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu unit meraih atau melampaui sasaran strategisnya.
- 4) *Threat* (T), adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah unit meraih sasaran strategis yang ditetapkan.

Faktor internal menurut Rangkuti terdiri dari komponen-komponen atau variabel yang berasal atau berada didalam suatu unit yang dianalisis. Komponen-komponen dari faktor internal cenderung lebih mudah dikendalikan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang memberikan pengaruh yang tidak langsung. Dalam jangka panjang, trend maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor eksternal ini dapat menjadi panduan bagi unit yang dianalisis untuk mendapatkan peluang dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang terjadi pada faktor eksternal ini karena tidak bisa dikendalikan.

Perencanaan analisis SWOT disusun dalam dua matriks yaitu :

- 1). *Matriks Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) ditujukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki unit yang dianalisis.
- 2). *Matriks Eksternal Factors Analysis Summary* (EFAS) ditujukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal dan mengukur sejauh mana peluang dan ancaman yang dihadapi unit yang dianalisis (David, 2006).

Analisis secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan matriks IFAS dan EFAS. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan unit dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternalnya dengan cara mendapatkan angka yang menggambarkan kondisi unit yang dianalisis terhadap kondisi lingkungannya. Langkah yang ringkas dalam melakukan penilaian internal dengan menggunakan matriks IFAS, sedangkan untuk mengarahkan perumusan strategi yang merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan tingkat persaingan digunakan matriks EFAS (David, 2006).

Menurut Rangkuti (2017), matriks IFAS dan EFAS diolah menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi faktor internal dan eksternal unit yang dianalisis.
Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal yaitu dengan mendaftarkan semua kelemahan dan kekuatan unit.

faktor eksternal diidentifikasi dengan mendata semua peluang dan ancaman suatu unit.

2) Penentuan bobot setiap peubah.

Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor-faktor strategi eksternal dan internal tersebut kepada pihak yang memiliki pengetahuan yang kuat akan faktor internal dan eksternal usahanya dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan.

3) Penentuan peringkat (*Rating*).

Penentuan *rating* dilakukan berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi unit yang bersangkutan. Hasil pembobotan dan *rating* dimaksudkan dalam matriks IFAS dan EFAS.

Selanjutnya nilai dari pembobotan dilakukan dengan nilai rata-rata *rating* pada tiap-tiap faktor dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor pembobotan.

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi unit yang dianalisis, matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi unit dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Rangkuti, 2017). Menurut David (2006), faktor-faktor kunci eksternal dan internal merupakan pembentuk matriks SWOT yang menghasilkan empat tipe strategi, yaitu :

- 1) Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
- 2) Strategi WO adalah mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan keunggulan peluang eksternal.
- 3) Strategi ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menghindari pengaruh dari ancaman eksternal.
- 4) Strategi WT adalah strategi bertahan dengan meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman lingkungan.

Menurut Rangkuti (2017), matriks SWOT dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut :

- 1) Strategi SO (*Strength – Oppurtunities*), dalam situasi ini unit yang dianalisis perlu melakukan pengembangan yang agresif, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan yang substansial untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi dalam kuadran SO disebut strategi agresif
- 2) Strategi ST (*Strength – Threats*), dalam situasi ini unit yang dianalisis perlu melakukan diversifikasi, melalui pengembangan produk-produk unggul. Strategi dalam kuadran ST disebut sebagai strategi diversifikasi.
- 3) Strategi WO (*Weaknesses-Oppurtunities*), dalam situasi ini manajemen harus melakukan analisis terhadap kelemahan sehingga mampu menghilangkan kelemahan utama itu. Strategi dalam kuadran WO disebut sebagai strategi balik arah.
- 4) Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), dalam situasi ini manajemen harus melakukan analisis terhadap kelemahan utama yang ada sekaligus menghindari ancaman. Strategi pada kuadran WT disebut sebagai strategi bertahan.

2.11. Definisi Operasional dan Parameter

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2

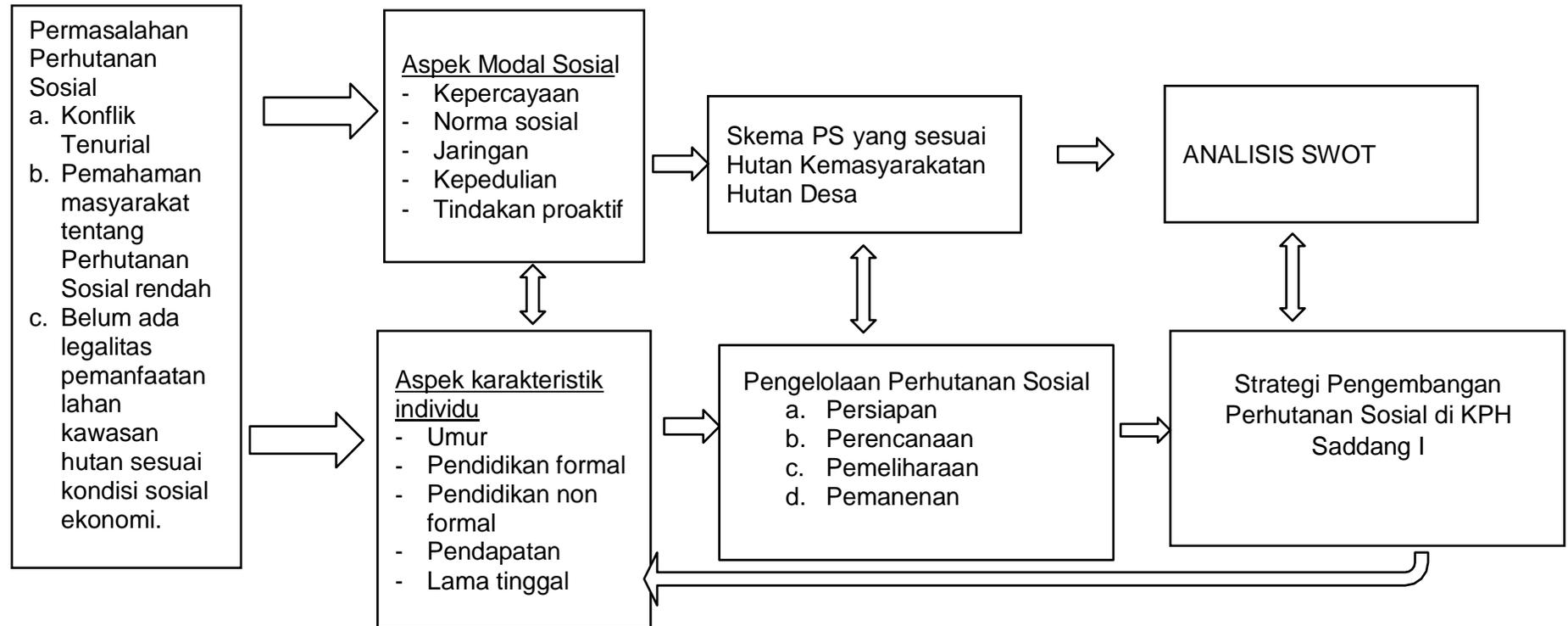
Tabel 2. Definisi Operasional Modal Sosial dan Karateristik Sosial

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Ukuran
Aspek Modal Sosial		
Tingkat Kepercayaan	Keyakinan yang dimiliki seseorang dalam mempersepsikan seseorang atau suatu keadaan berdasarkan perasaan dan kondisi yang dialami.	Tingkat kepercayaan terhadap : 1. Orang sekitar 2. Pemerintah 3. Tokoh masyarakat / Adat 4. Pihak luar (LSM)

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Ukuran
		5. Dinas Kehutanan
Norma Sosial	Bentuk <i>control social</i> informal tetapi dimengerti secara umum sebagai suatu formula untuk dapat menentukan pola tingkah laku yang diharapkan	Tingkat ketaatan terhadap : 1. Aturan tidak tertulis 2. Aturan pemerintah 3. Aturan agama 4. Kejujuran 5. Kesopanan 6. Kerukunan
Jaringan	Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas individu membangun suatu jaringan dalam kelompok atau komunitas	Tingkat kepadatan dan karakteristik : 1. Anggota RT yang terlibat. 2. Partisipasi 3. Kerelaan membangun jaringan 4. Kerjasama kelompok dalam komunitas 5. Kerjasama kelompok diluar komunitas 6. Kebersamaan
Kepedulian terhadap sesama dan lingkungan	Sikap yang menunjukkan perhatian, solidaritas dan empati	Tingkat kepedulian terhadap 1. Sesama 2. Lingkungan
Tindakan Proaktif	Peran aktif dan kerelaan warga selaku subyek pembangunan	Tingkat tindakan : 1. Keinginan berbagi pengalaman dan pengetahuan 2. Keinginan berbagi informasi 3. Partisipasi dalam kegiatan adat dan kemasyarakatan.

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Ukuran
		4. Kerelaan melakukan hal-hal positif 5. Keinginan untuk saling mengunjungi dalam rangka mencari informasi. 6. Keaktifan dalam menyelesaikan konflik.
Aspek Karakteristik Individu		
Umur	Usia responden dinyatakan dalam tahun	18-29 tahun 30-41 tahun > 41 tahun
Pendidikan Formal	Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh responden	Tidak sekolah – SD Tamat SLTP/SLTA Tamat perguruan tinggi
Pendidikan Non Formal	Keikutsertaan responden dalam pendidikan non formal seperti penyuluhan, pelatihan atau kursus	Tidak pernah 1-3 kali >3 kali
Tingkat Pendapatan	Penghasilan responden yang diperoleh dari berbagai sumber dalam satu bulan berdasarkan nilai tukar mata uang	< Rp. 500.000 Rp. 500.000 – 1.000.000 >1.000.000
Lama tinggal	Masa mukim responden di desa tersebut	< 5 thn 5-10 thn >10 thn
Luas Lahan Garapan	Luas lahan yang digarap oleh anggota baik milik sendiri maupun lahan perhutanan sosial	2-3 ha 4-5 ha >5 ha

2.12. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 . Kerangka Pikir Penelitian